

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA,
MAJELIS TARJIH, DAN *BAḤTHU AL-MASĀ'IL* TENTANG
TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Ghofur

NIM. C91215036



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofur

NIM : C91215036

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Shari'ah* terhadap keputusan
Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis
Tarjih, dan *Baḥthul Masā'il* tentang Talak di luar
Pengadilan Agama"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi
dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Abdul Ghofur
NIM. C91215036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masā’il* tentang Talak di luar Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Pembimbing,



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 04 februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP.195612201982031003

Penguji II



Dr. Ita Musarrofah, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III



H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197110102007011052

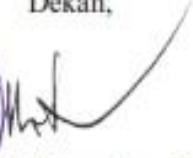
Penguji IV



Marli Candra LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, _____ 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Ghofur
NIM : C91215036
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ghofura837@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia,

Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* tentang Talak di luar Pengadilan Agama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2021

Penulis

Abdul Ghofur

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā’il* tentang Talak di luar Pengadilan Agama” adalah hasil penelitian pustaka (*library research*) yang menjawab pertanyaan tentang Bagaimana keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā’il* tentang Talak di luar Pengadilan dan Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majlis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā’il* tentang Talak di luar Pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yang mengambil dari sumber data dalam proses pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara terkait konsep dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* beserta hasil keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* mengenai Talak di luar pengadilan. Data yang dikumpulkan, selanjutnya pengeditan dan organizing dalam pengolahannya dan dilanjutkan dengan analisis yang menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum-hukum yang dikeluarkan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡṡu al-Masā'il* terhadap hukum Talak di luar pengadilan, dalam perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan ber hukum sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan (2) Majelis Tarjih menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan tidak sah sedangkan (3) *Baḥṡṡu al-Masā'il* menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan adalah sah secara mutlak. Selain itu, berdasarkan analisis *Maqāṡid al-Sharī'ah* yang dilakukan, Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai *hifz nasl* (menjaga keturunan) dalam hal ini yang bisa memberi keadilan yang seimbang antara hak laki-laki dan perempuan adalah pengadilan agama.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran: pertama, penulis menyarankan bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraianya di pengadilan Agama. Maka perceraianya sah menurut agama dan hukum positif, serta hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum; kedua, bagi aparatur pemerintah yang membuat Undang-Undang, untuk menambah regulasi perkawinan terkait konsekuensi pelaku Talak di luar pengadilan, dikarenakan masih ada sebagian umat Islam yang melakukan Talak di luar pengadilan.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan melakukan pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dimuka bumi ini. Sementara nikah dari segi istilah syara' ialah suatu akad yang membolehkan pasangan suami isteri mengambil kesenangan satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan syara'.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanpun menyebutkan pada bab I dasar perkawinan pasal (1) berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.² Serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga di sampaikan tentang arti perkawinan pada bab II Dasar – dasar Perkawinan pasal (2) bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dari definisi tentang perkawinan hampir sama yaitu sama-sama berdasarkan tujuan ketaatan kepada Tuhan. Selain mempunyai tujuan ketaatan kepada Tuhan pernikahan sendiri harus didasari dengan cinta, kasih sayang dan saling menghargai serta menghormati. Hal ini dilakukan agar keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga yang nyaman, damai, tenteram dan sejahtera. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang dan saling menghargai, selalu terjadi perselisihan, percekcoan, meskipun sudah menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut Talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya

[illegible]

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud no. 2178)⁶

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Akan tetapi, Allah SWT yang maha bijaksana menakdirkan bahwa pergaulan antara suami isteri kadang-kadang memburuk dan menjadi semakin buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan perceraian karena tidak dapat lagi ditegakkan garis-garis yang digariskan Allah SWT.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian itu harus

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

⁵ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz II (Beirut: Darul Fikr), 225.

⁷ Al-Kaff, Abdullah Zakiy, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 148.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang tidak sah menurut hukum Perundang-Undangan. Maksud dari perceraian di luar pengadilan agama ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami-isteri dengan dibantu oleh orang lain yang tidak berkompentensi dalam bidang hukum tanpa melibatkan instansi-instansi resmi yakni Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama, namun dilakukan secara langsung, prosesnya berlangsung secara singkat dan cepat, dan bersifat lisan antara suami-isteri.

[illegible]

Sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, yang mengeluarkan keputusannya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memandang bahwa bahwa perceraian adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap ringan dan dipermudah. Hal ini disebabkan perceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak menganggap remeh perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya.

Di samping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam

[illegible]

Karena ada perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthul Masā'il* tentang Talak di luar pengadilan Agama. Adapun pertimbangan lain karena ormas nya tersebut juga salah satu sebagai alasan penulis kenapa mengambil keputusan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah karena ormas ini adalah sebagai ormas islam terbesar yang ada di indonesia yang dapat mempengaruhi secara masif kepada khalayak umum. Dengan skripsi yang berjudul:

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV*, (Jakarta: 2012), 5.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. untuk itu permasalahan tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar Pengadilan?
2. Bagaimanakah Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak di luar Pengadilan?

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan temuan penulis ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak Diluar Pengadilan yang ditulis oleh Naili Salamah dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan dan bagaimana akibat hukum yang di timbulkan oleh putusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Talak diluar pengadilan. sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis selain perbedaan lembaga yang memfatwakan yang diteliti adalah kalau penelitian ini menelisik tentang fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan saja maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar Pengadilan.
2. Penelitian Pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Keputusan *Baḥṡhu al-Masā'il* Mukhtar NU ke-28 tahun 1989 Tentang Talak Di Pengadilan yang ditulis oleh Abdulah Nasyit fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan pada *Baḥṡhu al-Masā'il* Mukhtar NU ke-28 tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan dan akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut tentang kedudukan Talak

E. Tujuan Penelitian

[illegible]

- 1.

Philosophy

is
no
ga
a t
na
is

- Ma
-
- ne
-
- lar
-
- ua
-
- aa

Thalys

- # Ta

Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²³ Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar *al-shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²⁴.

Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang

Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²³ Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar *al-shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²⁴. Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang

- Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²³ Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar *al-shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²⁴. Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang

Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²³ Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar *al-shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²⁴.

Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²³ Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar *al-shari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²⁴. Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang

18

- a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar Pengadilan.
- b. Pasal-pasal yang membahas tentang perceraian dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, InPres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Primer,

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut²⁶. Sumber hukum primer penelitian ini yaitu: keputusan Majelis Tarjih yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M, keputusan *Baḥṭhu al-Masā'il* nomor: 03/MNU-28/1989 tentang Talak di Pengadilan Agama pada Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren. Serta hasil keputusan sidang ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia IV tentang Masail Fiqhiyah Mu'ashirah pada tanggal 1 juli 2012 di Taskmalaya.

²⁶ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

- a. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media.
- b. Membuat perbandingan antar isi media dan realita sosial.
- c. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat.
- d. Mengetahui fungsi dan efek media.
- e. Mengevaluasi *media performance*.
- f. Mengetahui apakah ada bias media.

Untuk memudahkan penulis, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

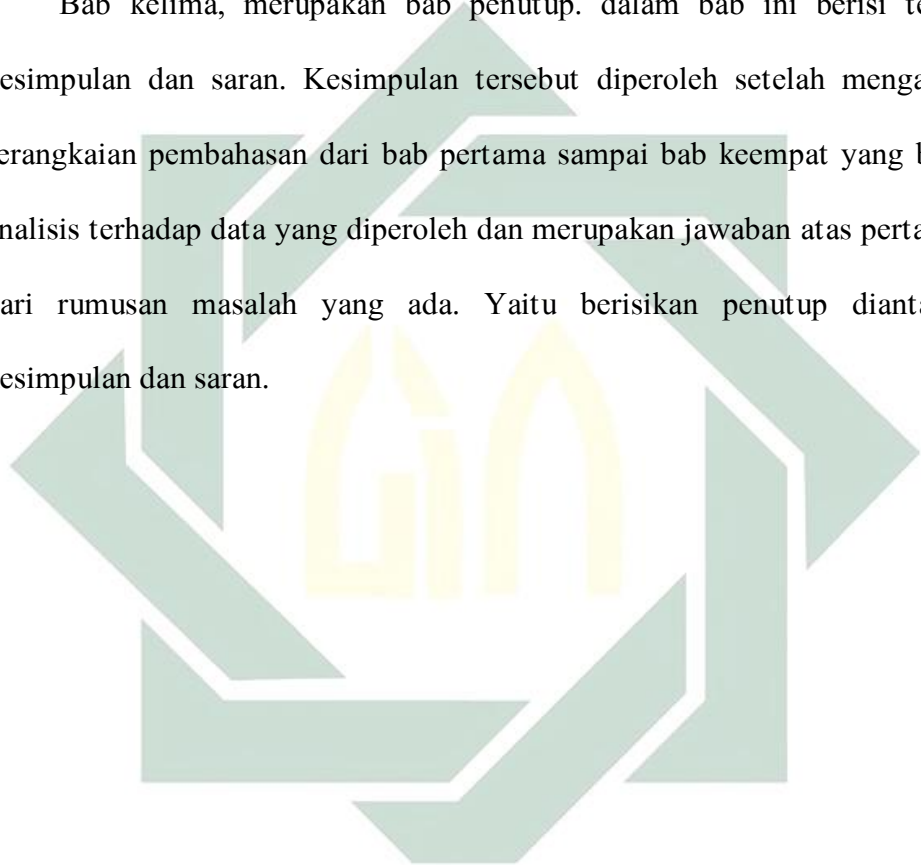
[illegible]

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan latar belakang di keluarkannya keputusan Talak di luar pengadilan agama menurut Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṣul Masā'il*, serta metode penetapan hukum yang di pakai Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* dalam memutuskan hukum Talak di luar pengadilan agama, serta keabsahan Talak di luar pengadilan agama perspektif Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* dan dalil-dalil argumentasinya.

[illegible]

pada bab ini memuat analisis kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang sah tidaknya Talak diluar pengadilan agama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yaitu berisikan penutup diantaranya kesimpulan dan saran.



KEABSAHAN TALAK DAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH

1. Pengertian Talak

حَلَّ رِبْطَةُ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Dalam fikih Islam, perceraian atau Talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.² Sedangkan para ulama memberikan pengertian Talak sebagai berikut:

- ⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1

- c. Menurut Abdur Rahman al-jaziri, Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan⁵
- d. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, Talak yakni Melepas tali akad nikah dengan kata Talak dan yang semacamnya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

⁶Abu Zakariya Al-Anshariy, *Fath al Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth., Juz 2), 72.

- Adapun yang dimaksud Talak pasal 117 kompilasi hukum Islam, Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸ Sebenarnya dapat putus apabila tata caranya telah di atur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang perkawinan meskipun perkawinan adalah ikatan suci namun perkawinan tidak dapat dipandang mutlak sehingga perkawinan dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang alamiah, bisa bertahan bahagia sampai akhir hayat dan bisa juga putus di tengah jalan.⁹ Menurut pernyataan sarakhsi, yang dikutip oleh Amir Nuruddin bahwa Talak dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami *talaq* atau inisiatif isteri *khulu'*.¹⁰

Dijelaskan dalam syariah Islam Talak dibolehkan karena merupakan solusi terakhir bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya. Agama Islam mensyariahkan agar suatu perkawinan bisa dipertahankan selama-lamanya, menyelimuti keluarga dengan rasa kasih

¹⁰Ibid, 208.

a. Perceraian dalam Hukum Islam

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah: 229).

Perceraian meskipun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwasanya perceraian adalah hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

b. Perceraian dalam Sabda Nabi disebutkan:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.”¹²

[illegible]

c. Perceraian Dalam Hukum Positif

Ketentuan mengenai Talak atau perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 yaitu: “perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian dan c) atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika

[illegible]

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 113 berbunyi:¹⁶

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena Talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah Talak, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Talak adalah, ikrarsuami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta; Akademika Pressindo, 1992) pasal 113, 140

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

Adapun adanya peraturan yang mengatur tentang

2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian kata rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah pekerjaan agar menjadi sah, Sedangkan pengertian syarat menurut bahasa adalah lafad yang berasal dari bentuk masdar dengan huruf ra' yang disukun dan memiliki bentuk jamak shurutun mempunyai arti menetapkan sesuatu dan menyanggupinya.²⁰ Adapun pengertian rukun menurut istilah adalah sesuatu yang membuat tidak sahnya atau batal suatu pekerjaan jika tidak terpenuhi, Sedangkan pengertian syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.²¹ Beberapa hal yang menjadi rukun Talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:²²

a. Suami, agar Talak menjadi sah suami disyaratkan:

1) Baligh: Anak kecil yang menjatuhkan Talak dinyatakan tidak sah, walaupun anak kecil tersebut pandai. Para ulama mazhab

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (kairo: Dār al-Fikr, 1985), 59.

[illegible]

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Masa iddah-nya belum habis pada Talak *raj'iy*
- 4) Tidak dalam kondisi haid

Menurut jumhur Fuqaha' baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan Talak tidak perlu saksi, karena Talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain²³, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

[illegible]

Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa Talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena Talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya Talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadis dari Rasulullah SAW atau pendapat sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan Talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut:²⁴ "Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa Talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab Talak adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya".

Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnahnya menjelaskan bahwa Islam memberikan hak Talak semata-mata kepada suami, karena Islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.²⁵ Berbeda dengan sebelumnya dalam kaitannya kesaksian Talak, Muhammad jawad Mugniyah mengutip dari bukunya Syekh Abu Zahrah *“al-Ahwal al-Syakhsiyyah”*, halaman

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), 158.

365²⁶, mengatakan bahwa Talak tidak di anggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi yang adil. Sesuai dengan firman Allah surat al-Thalaq:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُمْ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Sedangkan menurut Ja'far Subhani dengan mengutip pendapat al-Qurtubi menyatakan firman Allah SWT: ... dan persaksikanlah... memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan Talak. Kemudian persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.²⁷ Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, bahwa Atha' berkaitan dengan firman Allah: “Dan persaksikanlah kepada dua orang adil” berkata: “tidak boleh dalam nikah, Talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai firman Allah tersebut kecuali udzur.²⁸

Adapun menurut Peraturan PerUndang-Undangan perkawinan di indonesia yang di tuangkan dalam pasal 39 UU Perkawinan nomor 1 tahun

²⁶Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh LimaMadzhab (jakarta: Lentera Basritama, 1996)*, cct. Kc-2. 448-449.

²⁷ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih* (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I, 148.

²⁸ Ibid. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, 279.

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

³¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 141.

[illegible]

Istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Al-Muwaffaqat fi Ushul Al-Syariah*

³⁵Jamal al-Diin ‘Athiyyah, *Al-Nadariyyah al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah* (t.t: 1988), 102.

sebagaimana dalam ungkapannya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.³⁶

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua hukum yang diberikan Allah Swt. Memiliki tujuan yaitu demi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum *Maqāsid al Shari'ah*

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16 menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَمُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Maidah : 15-16).³⁷

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh ditemukan pula kata *al-hikma* yang diartikan yakni “tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum”

³⁶Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 64.

³⁷Deartemen Agama RI. Al-Qur'an & Terjemah (Bandug: CV Penerbit Diponegoro. 2013). 110

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا....

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya. . .³⁹

Adanya syariah Islam tentu memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maslahah* atau masalihat yakni untuk memberikan kemasalahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.⁴⁰

Al-Syatibi membagitujuan *Maqāṣid* menjadi dua, *Maqāṣid al-Syari* (tujuan Tuhan) dan *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi empat aspek dalam kandungan *Maqāṣid al-syari*:

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 231.

Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan *Maqāṣid al-syari'*, bagian ini akan menjelaskan mengenai *Maqāṣid al-mukallaf* atau tujuan mukallaf. Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam

[illegible]

Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah.⁴⁴

Semua hukum Allah pada dasarnya bermuara pada satu titik yaitu kebaikan bagi pada umat manusia. Syatibi membagi tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam tiga tingkatan yaitu *al-darūriyāt*, *al-ḥājīyāh*, dan *al-taḥṣīniyāt*. *al-darūriyāt* menempati urutan teratas yang bermakna bahwa tujuan yang paling utama karena umat manusia tidak dapat hidup tanpa memenuhi kebutuhan tersebut atau paling tidak hidupnya akan mengalami kerusakan. Tingkatan yang kedua adalah *al-ḥājīyāh* yaitu masalah yang mempunyai tujuan memudahkan serta menyelamatkan manusia dari

[illegible]

Syatibi mengkualifikasikan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi lima kelompok yang diberi nama *al-ḍarūriyāt al-khamsah* atau lima hal pokok (kebutuhan primer) yang harus dijaga. Terdapat juga kebutuhan yang lain yaitu *al-ḥājīyāh* (kebutuhan sekunder) dan *al-taḥṣyniyāt* (kebutuhan tersier). *Al-dharuriyat al-khamsah* atau lima hal pokok yang harus dijaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *al-ḍarūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.

⁴⁶Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78-81.

- c. Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

[illegible]

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- [illegible]

Memelihara akal dalam peringkat *al-tahṣyniyāt*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- [illegible]

ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

f.Hifzh Al-Mal (Memelihara Harta)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *al-darūriyāt*, seperti syariah tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *al-ḥājīyāt* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *al-taḥsynīyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Al-Darūriyāt al-khamsah atau lima hal pokok (kebutuhan primer) dalam uraian di atas merupakan kebutuhan dasar dan esensial bagi manusia sehingga harus dipenuhi dengan diusahakan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka akan mengakibatkan

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2014), 239.

TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN IJTIMA
ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH, DAN
BAḤṬHŪL AL-MASĀIL

1. Metode Penetapan Hukum Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV*. (Jakarta: 2012), 2.

2) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 2:

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

3) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 236:

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

b. Sunnah Rasulullah

Kata Sunnah sering di identikkan dengan kata Hadis. Kata Hadis sering di gunakan oleh ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata Sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul fikih. Di kalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dan Hadis, karena dari segi etimologi kedua kata itu sudah berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi, sedangkan Sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi.⁷

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 228.

Sunnah atau Hadis yang menjadi sumber hukum pada istinbath hukum keputusan Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV adalah sebagaimana berikut:

1) Hadits Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, Talak dan rujuk (kembali ke isteri lagi)." Riwayat Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim”.

2) Hadits Nabi SAW:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ.

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mende-ngar dan taat walaupun (yang memerintah adalah) seorang budak Habasyi (yang hitam).” (Hr. At-Tirmidzi no. 2676 dan lainnya, serta dishahihkan al-Albani).

c. Kaidah fiqih

Dalam etimologi bahasa Arab, kaidah dimaknai sebagai dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. Bila Dalam bahasa Arab terdapat kalimat “qawa’id al-bayt, maka yang di maksud adalah pondasi bangunan. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 127

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

قرأنا yang berarti membaca/bacaan. Secara terminologis para ulama'

2. Metode Ijtihad

¹⁰<http://www.lensamuh.com/2014/08/pengertian-al-quran-dan-al-sunnah-serta.html>, Diakses Tanggal 26 agustus 2020, 01:30 Am.

- 1) Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslim dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
- 2) Qiyas menurut ulama ushul, al-Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.
- 3) Al-Mashlahah al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemashlahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Mashlahah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.
- 4) 'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dandijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.

Dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan putusan bahwa perceraian harus

¹³Faishal Haqq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: CVCitra Media: 1997), 146.

Nabi SAW Bersabda:

Artinya: “Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)”.

¹⁴http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2012_Cerai%20Di%20Luar%20Sidang%20Pengadilan.pdf. Diakses Tanggal 20 September 2020, 03:30 Am.

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan Talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, Talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan Talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

[illegible]

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”.¹⁵

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan Talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudaratatan). Dari dasar hukum yang di gunakan lembaga fatwa muhammadiyah bahwa perceraian harus dilakukan melalui peroses pemeriksaan pengadilan, cerai Talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan Talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

[illegible]

1. Metode Penetapan Hukum *Baḥṡhu al-Masā'il*

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Baht̃hu al-Masāil* Nahdlatul Ulama adalah:

- ¹⁷Ahmad, Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 118.

3. Metode Manhajiy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga *Baḥṡhu al-Masā'il* dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.¹⁹

Lembaga *Baḥṡhu al-Masāʼil* (LBM) merupakan salah satu lembaga yang masuk pada struktur keorganisasian Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan namanya, *Baḥṡhu al-Masāʼil*, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Baḥṡhu al-Masā'il secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masā'il ad-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masā'il al-fiqhiyah (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini al-masā'il al-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiah (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

¹⁹Ahmad, Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 122

1. Hasil keputusan *Baḥthū al-Masā'il*

- a. Apabila suami belum menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu di hitung Talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddah nya.
- b. Jika suami menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim pengadilan agama itu merupakan Talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah *rajiiyyah*. Sedangkan perhitungan iddah nya dimulai dari jatuhnya Talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah

[illegible]

c. Jika Talak yang di depan hakim agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah ba'in, maka Talaknya, tidak diperhitungkan.

Keputusan ini di ambil dengan berdasar pada Nahdlatul Ulama dalam putusan *Baḥṡhu al-Masāil* yang dilaksanakan pada Mukhtamar NU yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hasil putusan ini menyatakan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan Talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka Talak yang di lakukan di pengadilan terhitung jatuh Talak yang kedua selagi isteri masih dalam masa'iddah. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Baḥṡhu al-Masāil* Nahdlatul Ulama dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama sebagai berikut:

[illegible]

وَأَمَّا يَمْعُ الْعَيْرِ بَيْنَ وَلَوْ رَجِعِيَّ لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتْهَا فَلَا يَقَعُ لِمُحْتَلَعَةٍ وَ رَجِعِيَّ انْقَضَتْ عِدَّتْهَا ۖ طَلَقُ مُحْتَارٍ مُكَلَّفٍ أَيْ بِالِغِ عَاقِلٍ.

Sesungguhnya Talak seorang suami yang tidak terpaksa, mukallaf, maksudnya baligh dan berakal, hanya terjadi pada wanita yang selain Talak ba'in, meski wanita yang terTalak raj'i yang belum habis 'iddahnya. Maka Talak tidak terjadi pada wanita yang terkhusus dan terTalak raj'i yang telah habis iddah.

2. Nihayah al-Zain Syarah Qurrah al-‘ain

بِحُبِّ عِدَّةٍ لِفِرْقَةِ زَوْجٍ حَيَوِطِئُونَ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ.

Wajib beriddah karena berpisah dengan suami yang masih hidup dan yang telah menggaulinya, walaupun telah yakin dengan kebersihan Rahim (dari sisa sperma).

3. Tuhfah al-Muhtaj

[illegible]

Seandainya suami berkata: “kamu saya Talak, kamu saya Talak, kamu saya Talak.” Atau “kamu saya Talak, Talak, Talak.” Dan diantara kalimat Talak yang berulang-ulang tersebut terdapat pemisah dengan diam yakni lebih dari sekedar bernafas dan gagap berbicara, atau pemisah dengan pembicaraan si suami atau pembicaraan si isteri, maka terjadi Talak tiga, meski si suami bermaksud menjadikan pengulangan itu sebagai pengukuhan. Sebab, kemungkinan hal itu jauh disertai adanya pemisah.

4. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain

لَوِ اجْتَمَعَ عَدَّةٌ تَشْخِصُ سَامِرَةَ بِأَنْوَطٍ مُطْلَقَةٍ هَلْ رَجَعِيَّةٌ مُطْلَقًا أَوِ الْبَائِنِ شُبْهَةً تَكْفِيْعِدَةً خَيْرَةً مِنْهُمَا فَتَعُدُّ هِيَ مِنْفِرًا عَالِوْطٍ وَتَنْدَرُ خَفِيَّةً بَاقِيَةً الْأُولَى .

Seandainya terhimpun dua iddah oleh seorang suami pada isterinya, seperti ia menyetubuhi isterinya yang diTalak raj'i secara mutlak, atau yang diTalak bain dengan persetubuhan syubhat, maka cukuplah 'iddah

بِنَعْمٍ أَفْرَارًا بِالطَّلَاقِ يَتَعَعَلِيْهِ ظَاهِرًا اَنْكَدَ نَوِيْدٌ يَنْوُكِدُ الْوَحْهْلُ حَالًا لِّسُّوَالِ الْفَائِقَا لَا رُدُّ تَطْلُقًا مَا صِيَّارُ رَجْعُهُ صُدْقِيْمِيْنِهَ لَا خِمْتَا هُوَ لَوْ قِيْلَ لِّطَلْقٍ اَطْلُقْتُ رَوْحَكَ كِتْلَانًا فَمَا اَطْلُقْتُوْا رَاوَادَ صُدْقِيْمِيْنِهَ.

8. Bughyah al-Musyatarsyidin

(Kasus dari Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi) Seandainya hakim memerintahkan suami untuk menTalak isteri, lalu ia menTalaknya, maka Talaknya tidak sah, meski si hakim tidak menakuti nakutinya.

[illegible]

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN IJTIMA
ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH DAN
BAḤṬHUL AL-MASĀIL TENTANG TALAK DI LUAR
PENGADILAN AGAMA**

Dari keputusan yang di hasilkan bisa di jelaskan bahwasanya memang di sahkannya Talak di luar pengadilan tetapi suami tetap harus ada pertanggung jawaban kebenarannya yang dapat di buktikan di pengadilan, artinya keputusan dari hasil sidang ijtima ulama tersebut tetap menggunakan aturan sesuai hukum Islam bahwasanya Talak merupakan hak suami dan dalam konsep Talak pun tidak ada penjelasan yang mengatur untuk menjatuhkan Talak harus di depan sidang pengadilan, tetapi yang menjadi landasan pokok keputusan tersebut yakni peraturan perundangan yang mengatur tentang perceraian, karena bagaimanapun juga untuk menutup segala kemungkinan dampak negatif yang akan timbul di kemudian harinya yakni melaksanakanya dengan sesuai acuan dari negara agar dari pihak anak dan isteri juga mendapatkan kepastian hukum yang sah

[illegible]

[illegible]

Diadakannya peraturan ini sebagai benteng yang memagari diri mukallaf agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan Talak sesuai hatinya. Yang paling berbahaya ialah ketika seorang suami dengan alasan bosan dengan isterinya, dia menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih cantik. Maka peraturan ini hadir dengan maksud bahwa menegaskan perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang remeh.⁹⁸ Namun sangatlah besar akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya perceraian. Dalam unsur

[illegible]

⁹⁹Ahmad Al-Roisuny, *Nadzhoariyyah al-Maqāsid indal al-Syathibi*, 344.

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *maṣlaḥah*, yaitu menghindari mafsadah sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang isteri dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar Talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami, bila hendak menceraikan isterinya dapat melakukan kapan saja. Dengan keadaan seperti ini, seorang isteri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang menTalaknya.

[illegible]

[illegible]

Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, memandang bahwa sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan perUndang-Undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan masalah, dan jika tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subyektifitas seorang suami. Negara ingin memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan isteri akan sama-sama di berikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraianya. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *dharûrî*.

Nahdlatul Ulama dalam fatwa *Baḥṡhu al-Masāil* menyatakan bahwa Talak di luar pengadilan itu hukumnya sah dan di anggap sebagai Talak yang pertama. Jika suami menjatuhkan Talak di dalam pengadilan agama setelah

1. Kedudukan Talak bagi suami

- [illegible]

2. Perhitungan *'iddah* isteri

- a. Jumlah *'iddah* Talak raj'iyah yang dimiliki oleh isteri menjadi berkurang. Hal ini karena ketika Talak di depan Hakim Pengadilan menjadi Talak kedua (jika suami sudah menjatuhkan Talak pertama di luar Pengadilan) maka *'iddah* isteri juga menjadi *'iddah* Talak kedua. Begitu juga ketika di depan Hakim dihukumi Talak ketiga (jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar Pengadilan) maka *'iddah* isteri juga menjadi *'iddah* Talak kedua. Begitu juga ketika di depan Hakim dihukumi Talak ketiga (jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar Pengadilan) maka *'iddah* isteri menjadi *'iddah* Talak ketiga atau Talak *bā'in* dan suami sudah tidak bisa rujuk lagi dengan isteri kecuali bekas isteri tersebut nikah dengan laki-laki lain, telah berhubungan badan dan bercerai lagi dengan laki-laki tersebut.
- b. *'iddah* yang harus dijalani isteri setelah jatuhnya putusan Talak oleh Hakim Pengadilan bisa menjadi tidak berlaku ketika putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan di saat masa *'iddah* dari Talak yang dilakukan di luar pengadilan telah selesai.

Sesuai dengan pemaparan di atas bahwasanya keputusan *Baḥṭhu al-Masāʾil* memberikan keputusan dengan berdasar pada dalil dalil yang berpatokan pada kitab – kitab fikih klasik (Kitab Fath al-Muʾin bi syarh Qurrah al-ʿAin yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari, Kitab Nihayah al-Zain bi syarh Qurrah al-ʿAin yang dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Tuhfah al-Muhtaj yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Haitami

Komparasi tiga putusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthū al-Masā'il* Berkaitan Dengan Talak diluar Pengadilan Secara Kontekstual. Seperti yang telah diulas pada subab sebelumnya, putusan dari masing-masing organisasi, baik Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthū al-Masā'il* memiliki

[illegible]

Kemaslahatan disini dapat ditinjau dari konteks *Maqāṣid al-Sharī'ah* - nya. Dalam kasus Talak diluar pengadilan ini, beberapa implikasi terbesar dalam fenomena Talak adalah perihal hak-hak isteri serta hak asuh dari sang anak, dengan kata lain, keberlangsungan hidup keturunan dari pasangan yang mengalami perceraian harus dijadikan sorotan utama. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan (*hifz nasl*) yang menjadi salah satu komponen dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia.¹⁰¹

Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Oleh karenanya, konsep *hifzh nasl* disini menjadi konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dijadikan penulis sebagai patokan utama dalam menanggapi putusan Talak diluar pengadilan.

[illegible]

Meninjau putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi keagamaan diatas (Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥṡhū al-Masāʼil*), maka dalam konteks hifdzun nasl, putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharuskan keterlibatan pengadilan dalam pengesahan Talak, menjadi putusan yang harus diprioritaskan, jika dibandingkan dengan putusan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, maupun *Baḥṡhū al-Masāʼil*.

Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pengadilan, maka Talak menjadi hal yang jelas, baik secara *de jure* dan *de facto*. Kejelasan proses Talak ini, membuat segala kemungkinan yang buruk salah satu hak asuh anak juga akan mengalami titik terang, sehingga keberlangsungan hidup dari keturunan pasangan yang melakukan perceraian menjadi jelas, karena ada pelimpahan tanggungjawab yang diberikan oleh pengadilan kepada sang ayah maupun sang ibu, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama adalah:

- 86

Berdasarkan rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis Menyarankan Bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan Agama agar perceraian sah menurut agama dan hukum positif, agar hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum.
2. Dan penulis menyarankan bagi aparat pemerintah yang membuat Undang-Undang, untuk menambahi regulasi Undang-Undang perkawinan terkait konsekuensi pelaku Talak di luar pengadilan, dikarenakan masih ada sebagian umat Islam yang melakukan Talak di luar pengadilan.

- [illegible]

- Saleh Mohd. *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Selangor Darul Ehsan: Hazrah Enterprise, 2009.
- Saleh Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang–Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sostroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit A. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.
- Subhani ja’far. *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih Cet ke I*, Jakarta: Lentera, 2002
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011.
- Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Al-Qur’an, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press:2013.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang–Undang perkawinan*. Surabaya: Kesindo tama, 2010.
- Undang–Undang Peradilan Agama*. Media Centre, tth.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Zahrah Abu Muhammad, *Usul al-Fiqh*. kairo: Dār al-Fikr, 1985.
- Zahro Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Zakiy Abdullah Al-kaff. *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.